



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LAKIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis

Website : www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id

Email : kesbangpolbks@yahoo.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	3
D. Isu Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	3
E. Struktur Organisasi.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisis Kinerja.....	10
C. Realisasi Anggaran.....	16
D. Analisis Efisiensi.....	16
BAB IV PENUTUP.....	22

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, meskipun masih terdapat kekurangan, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 31 Januari 2019

 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS 

Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

KATA PENGANTAR

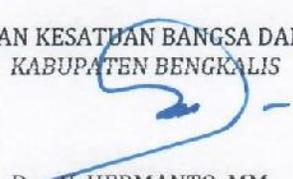
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 01 Februari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Dis. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik. Sesuai dengan Pasal 14 Bab IX Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2012 diantaranya :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 4 (Empat) sasaran dan terdapat 5 (Lima) indikator kinerja sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai, yaitu dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunan dokumen ini juga diatur melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2019;

D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya mencapai visi misi serta tujuan strategis ditemukan kondisi kecenderungan dan perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan utama (strategic issued) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

- a. Perkembangan ideologi dan wawasan kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, hal ini ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Kasus munculnya gerakan radikalisme, hilangnya sikap toleransi kepada sesama, perusakan rumah ibadah, kesenjangan ekonomi, konflik antar suku

dan ketidakadilan dibidang hukum dan masih banyak kasus yang terjadi merupakan contoh kasus penyimpangan ideologi yang terjadi. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

- b. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila pada semua elemen masyarakat.
- c. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.
- d. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daeran terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan terorisme, aliran sesat keagamaan atau pertikaian antar kelompok masyarakat. Untuk itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional daerah telah diterbitkan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dengan tindak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- e. Kewaspadaan kemungkinan konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar etnis dan suku bangsa di Kabupaten Bengkalis. Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Bidang Politik

- a. Pola pikir, sikap dan prilaku generasi muda yang terkontaminasi akibat interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup dan kesadaran berpolitik.
- b. Partisipasi politik masyarakat yang perlu ditingkatkan.
- c. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik.

3. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi

- a. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah.
- b. Belum optimalnya koordinasi dibidang ekonomi, sosial agama dan budaya.

- c. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daeran terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan terorisme, aliran sesat keagamaan atau pertikaian antar kelompok masyarakat. Untuk itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional daerah telah diterbitkan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dengan tindak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- d. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dalam membangun bangsa dan Negara sebagai wujud rasa cinta terhadap bangsa dan negara.
- e. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di Kabupaten Bengkulu.
- f. Masih banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaanya.

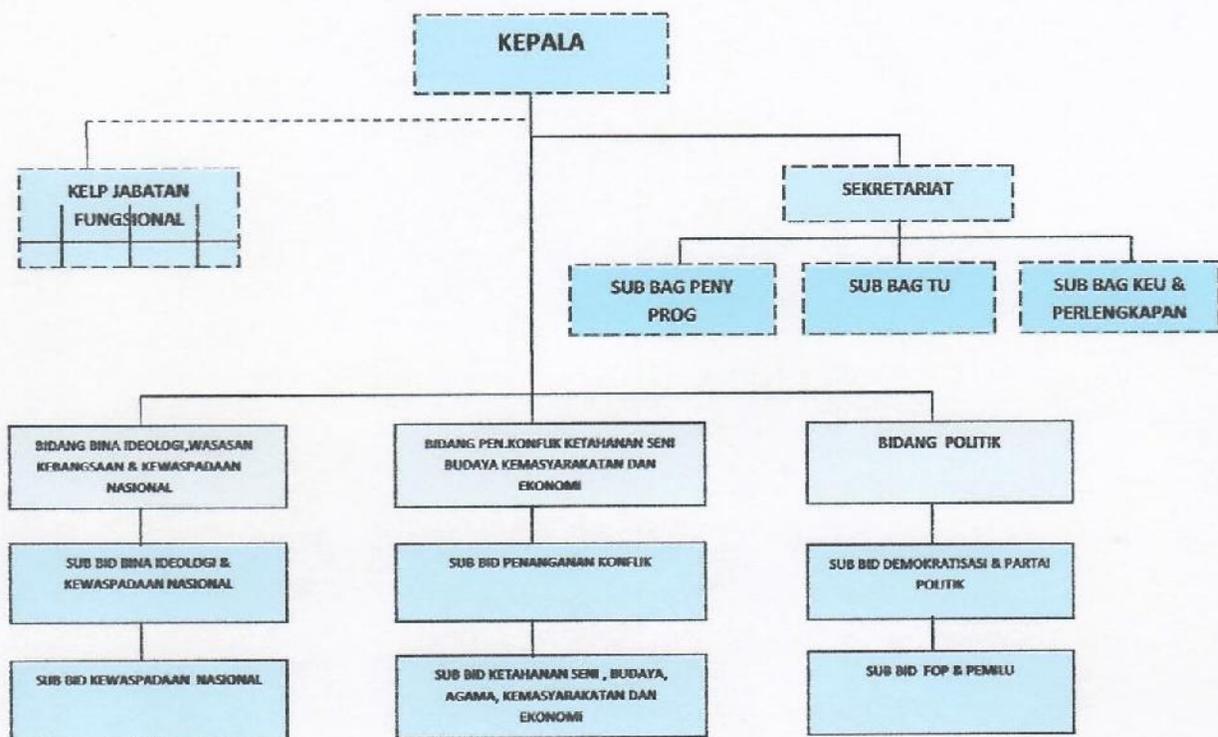
E. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
4. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik

- 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5. Bidang Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi, Partai Politik dan Pemilu

Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut :



1.1 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I *Pendahuluan*

Penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek Startegis Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II *Perencanaan Kinerja*

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III *Akuntabilitas Kinerja*

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV *Penutup*

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	80%	80%
2.		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	68%	70%
		Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar nasional	40%	50%	60%	70%	80%	80%
		Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar keagamaan	40%	40%	50%	60%	70%	80%
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	70%	70%
		Persentase peran aktif masyarakat menjaga KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%

		Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	50%	50%	60%	4,0%	80%	80%
4.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%	50%	50%	50%	50%	55%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	B	B	B	B
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	0,50%
		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,50%
2.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,6%
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	4,0%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun 2019			Realisasi s/d Tahun 2019	Target Akhir Tahun (2021) Renstra
				2018	2019	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	%	60	0,18%	0,50%	0,18%	36,00%	0,18%	0,18%
		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	60	0,39%	0,50%	0,39%	78,00%	0,39%	0,39%
2	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	%	15,38	2,00%	2,6%	2,00%	76,9%	2,00%	2,00%
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	%	2,00	100%	4,0%	100%	25,00%	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	%	54,41	83%	50%	83%	166%	83%	83%

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan

Indikator	2018	2019		Capaian 2019 thdp 2021	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	60,00%	0,50%	0,18%	36,00%	36,00%
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	60%	0,50%	0,39%	78,00%	78,00%
Rata-rata Capaian				114,0%	114,0%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan indikator **Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila** sesuai capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 60%. Sedangkan untuk tahun 2019, realisasinya mencapai 0,18% dari target yang ditentukan sebesar 0,50% atau capaian pada tahun 2019 terhadap 2021 menunjukkan capaian (36,00%). Dapat dilihat realisasi target pada indikator ini pada tahun 2019 rendah, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi pagu kegiatan pada indikator ini sehingga volume kelompok masyarakat yang akan diberikan pembinaan hanya dilakukan di (3) tiga Kecamatan dengan peserta 50 Orang perkecamatan. Dengan demikian indikator tersebut diatas dilihat dari capaian kinerja sudah sesuai dengan target penetapan kinerja, namun fisik kegiatan mencapai 100%.

Sementara untuk indikator **Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**, target yang ditentukan pada tahun 2019 sebesar 0,50% dengan realisasi 0,39% atau capaian pada tahun 2019 terhadap 2021 menunjukkan capaian (78,00%), dengan artian bahwa indikator tersebut mencapai target penetapan kinerja. Meskipun hanya focus pada satu lokasi/Kecamatan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan **indikator Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat pada hasil

capaiannya. Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2019 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 1.

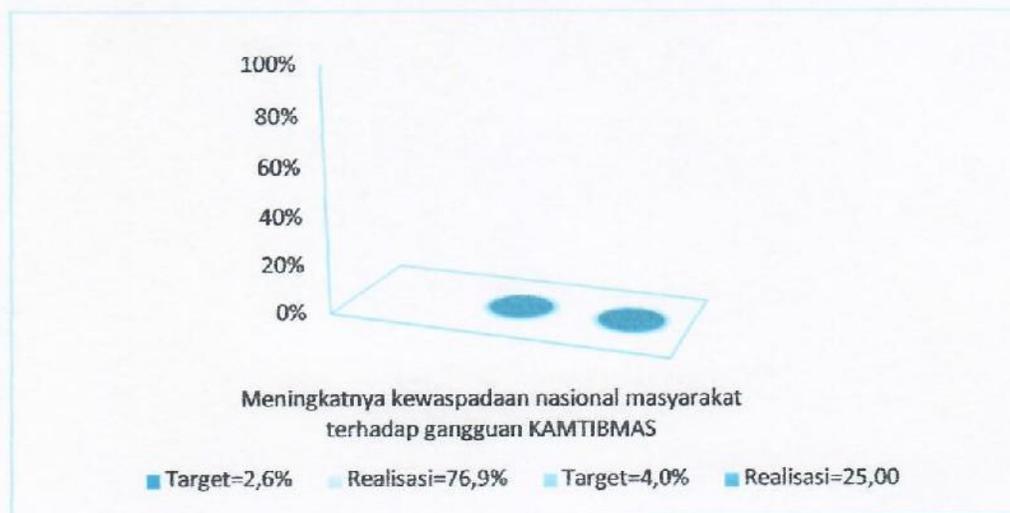
Disamping itu juga dukungan semua pihak terutama stakeholders terkait termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan juga tersedia sesuai jadwal kegiatan.

Sasaran 2

Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	15,38%	2,6%	76,9%	29,6%	29,6%
Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	2,00%	4,0%	25,00%	6,25%	6,25%
Rata-rata Capaian				35,9%	35,9%

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dengan indikator *Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS* capaiannya sebesar 29,58% dibandingkan capaian pada tahun 2018 sebesar 15,38%. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang berkaitan dengan KAMTIBMAS seperti kasus penyalahgunaan narkoba yang sedang marak di Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum serta adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Sementara target indikator pada tahun 2019 adalah 2,6% , dengan realisasi 76,9%, sehingga capaian pada tahun 2019 sebesar 29,6%. Melihat realisasi dan capaian tahun 2018 dan 2019 dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat sehingga gangguan KAMTIBMAS dapat dicegah.

Sedangkan untuk indikator *Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan* terdapat realisasi 25,00% dari target 4,0% dengan capaian sebesar 6,25%. Kegiatan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan sudah maksimal terlaksana atau mencapai 100% dilihat dari fisik kegiatan.

Jadi untuk sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dengan indikator *Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS dan Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan* terdapat rata-rata capaian sebesar 35,9%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS**, rata-rata capaiannya sudah maksimal, hal ini dikarenakan meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis melalui pelaksanaan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti dilakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya peredaran miras, narkoba dan terorisme, sehingga masyarakat mendapatkan pembinaan secara langsung terhadap bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mendapatkan kondisi yang aman dan tertib melalui pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat sendiri dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kembali pada Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2019 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 2.

Sasaran 3**Meningkatnya partisipasi politik masyarakat**

Indikator	2018	2019			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	54,41%	50%	83%	166%	166%
Rata-rata Capaian				166%	166%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** dengan indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu*, rata-rata capaiannya sebesar 166%. capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 54,41 dari target awal 50%. Sedangkan pada tahun 2019 target semula sebesar 50% dengan realisasi sebesar 83%. Dapat disimpulkan bahwa apabila melihat dari rata-rata capaian pada sasaran ini bahwa terdapat peningkatan peran aktif /partisipasi masyarakat pada proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dengan indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu* berhasil mencapai rata-rata sasaran sebesar 116%, hal ini terjadi dengan dilakukannya berbagai upaya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan didukung oleh stakeholders serta pemangku kepentingan dari elemen aparat penegak hukum/ masyarakat agar meningkatnya pendidikan politik masyarakat. Adapun upaya tersebut seperti dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media, baik media elektronik dan publikasi (baliho, spanduk, banner) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif pada tahun 2019 yang telah lalu. Dari capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan baik dilihat dari peningkatan peran aktif dan partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilu.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.804.361.574,- atau 90,71 % dari pagu sebesar Rp. 8.603.675.927,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran **Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan** yaitu sebesar 94,3%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** yaitu 76,6%. Hal ini disebabkan adanya mutasi pejabat (Kepala Bidang) pada Bidang Politik yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertepatan pada akhir tahun 2019

Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	Rp. 172.276.000,-	Rp. 162.396.000,-	94,3%
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	100%	Rp. 451.284.700,-	Rp. 413.039.700,-	91,5%
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100%	Rp. 548.850.500,-	Rp. 420.488.840,-	76,6%
Total		Rp. 1.172.411.200,-	Rp. 995.924.540,-	84,9

C. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100	94,3	5,70
2.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	100	91,5	8,50
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100	76,6	23,40

1.1. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 8.603.675.927,-** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp, 7.804.361.574,-** atau setara **90,71%**, sedangkan realisasi fisik mencapai **100%**, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- f. *Anggaran Belanja Tidak Langsung* sebesar **Rp. 4.904.814.927,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.781.370.590,-**, atau sebesar **97,48%**.
- g. *Anggaran Belanja Langsung* sebesar **Rp. 3.698.861.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.022.990.984,-**, atau sebesar **81,73%**.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.904.814.927	4.781.370.590	97,48	100
II.	BELANJA LANGSUNG	3.698.861.000	3.022.990.984	81,73	100
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.558.537.700	1.373.982.658	88,16	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.150.000	36.127.500	99,94	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000	70.049.587	67,36	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12.000.000	4.980.820	41,51	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	164.700.600	126.047.610	76,53	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.591.900	45.407.316	89,75	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.098.200	60.423.467	86,20	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.697.000	17.157.650	96,95	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	10.450.000	95,00	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	76.900.000	75.700.000	98,44	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	788.000.000	714.508.708	90,67	100
11	Penyediaan jasa keamanan	115.200.000	115.200.000	100,00	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	19.200.000	19.200.000	100,00	100
13	Publikasi informasi pembangunan	93.000.000	78.730.000	84,66	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.325.000	207.658.086	68,91	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	68.125.000	64.070.000	94,05	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.150.000	15.147.963	93,80	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	174.050.000	87.199.042	50,10	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	16.243.263	90,24	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.997.818	99,99	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	47.840.000	95,68	100
1	Kursus, workshop dan seminar	50.000.000	47.840.000	95,68	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.835.600	53.896.200	88,59	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	50.841.600	44.276.600	87,09	100
2	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan pemeliharaan barang unit	9.994.000	9.619.600	96,25	100
V	Program Pengembangan	250.195.400	234.650.400	93,79	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
	Wawasan Kebangsaan				
1	Pembekalan bagi Forum Komunikasi Umat Beragama	119.545.400	114.055.400	95,41	100
2	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	130.650.000	120.595.000	92,30	100
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	373.365.300	340.785.300	91,27	100
1	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme	70.859.200	69.309.200	97,81	100
2	Penyuluhan peningkatan kesadaran bela Negara bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	55.809.000	51.799.000	92,81	100
3	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	109.248.100	88.098.100	80,64	100
4	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem)	20.982.000	20.982.000	100,00	100
5	Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	116.467.000	110.597.000	94,96	100
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.104.602.000	764.178.340	69,18	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
1	Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	93.371.000	28.963.000	31,02	100
2	Sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Orkemas	139.787.500	120.427.500	86,15	100
3	Monitoring Pemliu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	210.742.500	116.397.500	55,23	100
4	Sosialisasi Pemliu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	380.409.500	296.675.900	77,99	100
5	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	168.441.000	123.812.940	73,51	100
6	Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Partai Politik	111.850.500	77.901.500	69,65	100
JUMLAH (BTL + BL)		8.603.675.927,-	7.804.361.574,-	90,71	100

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 bila dilihat tabel diatas, sudah mencapai kinerja maksimal baik untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun penyerapan anggaran apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan khusus pada Belanja Langsung belum terealisasi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja pada tahun 2019. Hal ini terkait adanya rasionalisasi anggaran yang berfaku untuk semua PD namun pada tahun 2020 diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal yang telah disepakati bersama serta dukungan anggaran yang cukup.

BAB IV**PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan secara optimal, apabila dilihat dari rata-rata capaian terhadap 5 (lima) indikator kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja pada Badan Kesbang dan Politik antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Kesbang dan Politik yang berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang sebelumnya telah ditentukan. Namun demikian untuk tahun 2020, Badan Kesbang dan Politik tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis perlu dukungan dan komitmen secara aktif semua pihak sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai bukti nyata komitmen penerima amanah bukan hanya menjadi wacana dan polemik pemikiran semata-mata
2. Optimalisasi mekanisme internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diharapkan permasalahan yang muncul dapat diminimalisir agar tidak mempengaruhi realisasi maupun capaian indikator kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas Program dan kegiatan khususnya dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis, dengan Organisasi Kemasyarakatan serta pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
4. Dilakukan upaya-upaya guna mengantisipasi hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

- a). Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
- b). Komitmen dari pejabat yang telah mengikat diri dalam Perjanjian Kinerja bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk benar-benar mengimplementasikan indikator program dan sasaran kegiatan masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan.
- c). Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
- d). Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
- e). Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.